



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEPTIANA TRI SETIOWATI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 455348

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.898.130.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 298.130.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **207.500.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. LAINNYA, PANDORA SEPEDA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **297.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.182.471
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.000.000
Sub Total	Rp.	2.468.312.471
III. HUTANG	Rp.	752.643.877
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.715.668.594

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.